

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Kansa Nurul Aini Amelia Medindari*, Hafizh Yudha Arianto, Cica Wahyuni, Ade Sri Mulyani

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 25/06/2024
Revised : 29/06/2024
Published : 31/07/2024



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 4
No. : 1
Halaman : 63 - 72
Terbitan : **Juli 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 5](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama tahun 2021 sampai tahun 2023. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup analisis rasio efektivitas dan efisiensi. Pengukuran efektivitas dengan membandingkan antara realisasi pendapatan yang telah digunakan dengan target dari realisasi pendapatan yang telah dicapai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (Library Research) mencakup mengumpulkan informasi dan data dari sumber bacaan yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku referensi, laporan penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, dan jurnal. Metode kedua yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian dokumentasi. Hasil pengukuran efektivitas didapatkan hasil bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan sangat efektif. Namun untuk hasil pengukuran tingkat efisiensi didapatkan hasil bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum berjalan dengan efisien.

Kata Kunci : Efektivitas; Efisiensi; Anggaran Belanja

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of effectiveness and efficiency of the budget of the Yogyakarta City Transportation Agency from 2021 to 2023. The analysis used in this study includes analysis of effectiveness and efficiency ratios. Measurement of effectiveness by comparing the revenue realization that has been used with the target of the revenue realization that has been achieved. The research method used is a qualitative descriptive analysis approach method using data collection methods in the form of library research which includes collecting information and data from reading sources available in the library, including reference books, relevant previous research reports, articles, and journals. The second method used is to use documentation research. The results of measuring effectiveness show that from 2021 to 2023 the budget of the Yogyakarta City Transportation Agency has been running very effectively. However, for the results of measuring the efficiency level, it was found that from 2021 to 2023 the budget of the Yogyakarta City Transportation Agency has not run efficiently.

Keywords : Effectiveness; Efficiency; Expenditure Budget

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, perkembangan anggaran juga ikut serta dalam mengalami perubahan. Sistem penganggaran sektor publik Indonesia mengalami banyak perkembangan, termasuk aturan, metode, dan peraturan yang relevan. Beberapa tahun sebelumnya, sistem penganggaran di Indonesia masih menggunakan sistem anggaran tradisional. Sistem ini lebih fokus pada pelaksanaan dan pengawasan anggaran, dengan penekanan utama pada pembagian anggaran kepada departemen atau lembaga sesuai dengan tujuan mereka dan kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan yang berlaku. Namun, setelah reformasi keuangan negara yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kini Indonesia mulai beralih ke sistem penganggaran berbasis kinerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2006, didalamnya mengatur bagaimana cara membuat dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Manurung & Mauliddina, 2021). Setiap satuan kerja perangkat daerah dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, harus membuat anggaran yang mendukung pencapaian tujuan strategis melalui sistem penganggaran berbasis kinerja. Pergeseran ke sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan langkah penting dalam reformasi keuangan negara Indonesia. Bagian penting dari sistem ini adalah pengukuran dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran menghasilkan output dan hasil yang sesuai dengan rencana pembangunan. Selain dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, pada sistem ini juga dapat mendorong pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada hasil dan konsekuensi dari setiap pengeluaran anggaran. Akibatnya, dapat diharapkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Anggaran adalah dokumen yang memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran, baik pendapatan maupun pengeluaran, yang diungkapkan dalam bentuk nilai uang yang diperkirakan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dokumen ini juga mencakup data dari pengalaman sebelumnya untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja (Putra, 2021). Memiliki suatu anggaran yang efektif dan efisien merupakan penting untuk memastikan bahwa program dilaksanakan tidak gagal dan tetap terlaksana, karena anggaran berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun pengelolaan keuangan tidak selalu dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan efektif dan efisien, terutama dalam hal penerimaan daerah. Pengelolaan keuangan harus dioptimalkan kembali untuk menjadi yang lebih baik jika pengelolaan keuangan tidak efisien dan efektif. Oleh karena itu, anggaran sangat penting bagi pemerintah dalam memperkirakan pencapaian kinerja yang diharapkan. Anggaran juga penting untuk mengelola sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja masyarakat yang diinginkan dan membangun tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan adalah tahap awal dari penganggaran, yang harus dilaporkan secara akurat kepada DPRD dan masyarakat (Rondonuwu *et al.*, 2023). Menerapkan anggaran berbasis kinerja adalah salah satu pendekatan yang penting untuk meningkatkan proses penganggaran agar lebih baik. Pendekatan ini menekankan penyusunan anggaran berdasarkan tujuan kinerja yang ingin dicapai.

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran publik (Junery & Norhanisah, 2019). Dalam sistem ini, pengalokasian anggaran didasarkan pada pencapaian tujuan atau kinerja spesifik, bukan hanya pada jumlah pengeluaran semata. Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, upaya untuk menerapkan dapat dikenali melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000). Peraturan ini mewajibkan semua tingkatan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja. Peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan pengelolaan anggaran daerah lebih transparan dan akuntabel. Anggaran Berbasis Kinerja mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada hasil dan efek dari program yang dijalankan, sehingga anggaran dapat dialokasikan dengan lebih tepat sasaran. Selain itu, Anggaran Berbasis Kinerja juga membantu mengidentifikasi program yang kurang efisien untuk dapat diperbaiki atau dihentikan. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen keuangan daerah.

Anggaran Berbasis Kinerja mendorong memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan berfokus pada kinerja dan hasil. Ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses anggaran, karena masyarakat dapat melihat dan menilai sejauh mana pemerintah daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, Analisis Berbasis Kinerja merupakan langkah besar menuju reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Dengan penerapan yang konsisten dan komprehensif, sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan anggaran publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan suatu kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu upaya lembaga pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang digunakan untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja dan memenuhi kewajiban dalam menjalankan tugas pemerintahan (Garini, 2021). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan menunjukkan pertanggungjawaban publik atas tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang diberikan kepada instansi pemerintah. Laporan ini digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencapaian kinerja yang diukur. Pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis pengukuran kinerja, menunjukkan pencapaian kinerja. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian instansi, yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penyediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa depan agar lebih relevan, efektif dan efisien (Dinas Perhubungan, 2023). Secara keseluruhan, penyediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, adalah langkah penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan. Dengan laporan ini, instansi pemerintah tidak hanya memenuhi kewajiban mereka dalam hal akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan komitmen untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian (Rondonuwu *et al.*, 2023), anggaran berbasis kinerja berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, karena SKPD Kota Yogyakarta telah menerapkannya dengan baik. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Refika, 2022), penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan kebijakan pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan kinerja masing-masing bagian atau seksi, rata-rata mencapai 99,50% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, dan peningkatan kualitas pelaksanaan dan jenis kegiatan yang dilakukan. Dalam proses penganggarannya, pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan suatu sistem anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta”.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu bentuk dari penelitian kualitatif di mana peneliti menginvestigasi kejadian atau fenomena kehidupan individu-individu dan kemudian menyajikan informasi yang diperoleh secara deskriptif berdasarkan kronologi yang terjadi (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang sejarah singkat instansi, struktur organisasi, serta data lain yang terkait dengan penelitian. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran berbasis kinerja telah berjalan dengan baik pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna data disebut sebagai data sekunder (Paramita *et al.*, 2021). Data sekunder yang digunakan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2021-2023.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data menggunakan berbagai sumber bacaan yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku referensi, laporan penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, dan jurnal yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan ingin dipecahkan dan juga menggunakan (Sari & Asmendri, 2020). Metode yang kedua adalah penelitian dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan data laporan anggaran setiap tahunnya dengan cara mengutip atau menyalin data tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Perusahaan

Dinas Perhubungan merupakan termasuk kedalam struktur otonomi daerah dengan menjalankan tugas utamanya melaksanakan urusan pemerintahan terkait prinsip otonomi daerah dan tugas bantuan pada sektor transportasi, Dinas Perhubungan berada di bawah komando Gubernur dan mengemban tanggung jawab kepada Sekretariat Daerah.

Di bidang transportasi, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta beroperasi sebagai nama awal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) pada tahun 1996. Terletak di Jl. Kyai Mojo 70 C, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta. Pada awal pendiriannya, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Gembong Suwarso, S. H. pada tahun 1996 sampai 1997. Lalu Ir. Widiastjarjo memimpin Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari tahun 1998 hingga 2000 menggantikan Gembong Suwarso, S. H. Pada tahun 2000, terjadi perubahan nama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diubah menjadi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berpindah ke Jalan Magelang Nomor 41, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, di bawah perintah Widorismono, S. H., M.T., yang menggantikan Ir. Widiastjarjo sebagai Kepala Dinas. Menggantikan Widorismono, S.H, M.T., Agus Budiono, SH, dipilih sebagai Kepala Dinas Perhubungan untuk periode empat tahun.

Kemudian Priyono Raharjo SHKN menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2009 hingga 2011. Widorismono, S.H., M.T. kembali menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2011 hingga 2012. Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berpindah ke Jl. Imogiri Timur No. 1 selama pemerintahan Widorismono, S.H., M.T., yang dapat ditemukan sampai saat ini. Plt. Drs. Purnomo Raharjo adalah Kepala Dinas dari tahun 2013 sampai 2014. Yang kemudian dipimpin oleh Wirawan Hario Yudo, S.H., M.M. hingga 2018. Agus Arif Nugroho, S.STP., M.Si. diangkat menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sampai sekarang masih dalam menduduki posisi tersebut. Dengan semua perubahan kepemimpinan dan lokasi kantor yang terjadi, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan layanan transportasi untuk masyarakat kota Yogyakarta dengan berbagai perubahan kepemimpinan dan lokasi kantor.

Visi & Misi

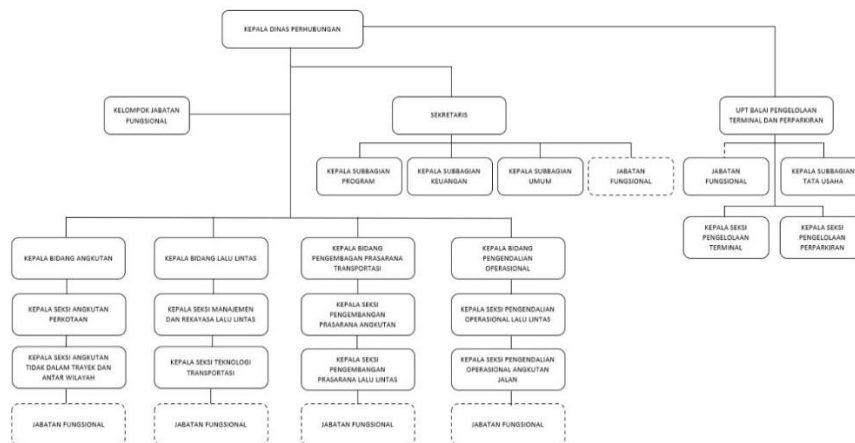
Visi

"Terwujudnya Pelayanan Transportasi Kota yang Berkeselamatan, Aman dan Nyaman, Serta Tertib dan Lancar, yang Berwawasan Lingkungan serta Responsif Gender"

Misi

"Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Jalan "

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Analisis Hasil Penelitian

Rasio efektivitas dan rasio efisiensi adalah rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Di sisi lain, rasio efisiensi merupakan rasio perbandingan yang menunjukkan hasil kerja yang diperoleh dari operasi perusahaan dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya.

Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik (Iin Ivanda Listari *et al.*, 2022). Dalam hal ini, apabila tujuan-tujuan tersebut berhasil dicapai sesuai dengan rencana awal yang telah disusun secara matang, maka tujuan-tujuan tersebut dapat dianggap telah tercapai secara efektif.

Analisis efektivitas adalah suatu keadaan yang menjelaskan sejauh mana pencapaian realisasi anggaran yang telah tercapai dibandingkan dengan anggaran yang telah diberikan, atau dengan penggunaan anggaran yang telah terealisasi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada Dinas Perhubungan Yogyakarta (Dharmawan *et al.*, 2021). Berdasarkan pendapat (Maidar & Rosalia, 2022), efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja yang direncanakan, sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad \dots(1)$$

Kemudian, hasil persentase dari perhitungan tersebut akan dikategorikan kedalam beberapa tingkatan penilaian efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektifitas
> 100%	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Hasil penelitian tentang efektivitas anggaran belanja langsung dengan menilai realisasi anggaran belanja terhadap target anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023 dijelaskan di bawah ini:

$$2021 = \frac{20.739.932.004}{19.304.062.811,78} \times 100\% = 107\% \quad \dots(2)$$

$$2022 = \frac{22.045.683.799}{20.839.081.614} \times 100\% = 105\% \quad \dots(3)$$

$$2023 = \frac{24.467.499.297}{23.437.903.376} \times 100\% = 104\% \quad \dots(4)$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektifitas anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2021 hingga 2023 di atas, kriteria dapat ditentukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efektifitas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efektivitas %	Kriteria
2021	20.739.932.004,00	19.304.062.811,78	107%	Sangat Efektif
2022	22.045.683.799,00	20.839.081.614,00	105%	Sangat Efektif
2023	24.467.499.297,00	23.437.903.376,00	104%	Sangat Efektif

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas setiap tahunnya menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Anggaran belanja untuk tahun 2021 yang dialokasikan sebesar Rp. 20.739.932.004, sementara untuk realisasi anggaran mencapai Rp. 19.304.062.811,78. Data ini menunjukkan bahwa, rasio efektifitas anggaran mencapai 107% dengan kriteria pada penilaian rasio efektifitas adalah "sangat efektif". Tingkat efektivitas ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sangat efisien dan mampu memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik.

Anggaran belanja untuk tahun 2022 yang dialokasikan mengalami peningkatan menjadi Rp. 22.045.683.799, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.839.081.614. Pada tahun ini, Rasio efektifitas anggaran mencapai 105%. Meskipun terjadi penurunan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini masih berada dalam kategori "sangat efektif". Hal ini menunjukkan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta masih dapat mengelola dan memanfaatkan anggaran dengan sangat baik meskipun ada peningkatan anggaran.

Anggaran belanja kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 24.467.499.297, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 23.437.903.376. Sama seperti tahun 2021, rasio efektifitas anggaran kembali mencapai 104% dengan menunjukkan kriteria penilaian tetap "sangat efektif". Hal ini dapat dikatakan bahwa konsistensi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengelola anggaran yang ada secara efektif dan efisien.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah perbandingan yang mengukur seberapa efektif suatu entitas, seperti pemerintah daerah atau perusahaan, dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk menghasilkan output atau mencapai hasil tertentu. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh (Susanto, 2019).

Analisis Efisiensi adalah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan. Analisis ini dianggap efisien jika tingkat pencapaiannya kurang dari seratus persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif tanpa mencapai atau melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan (Panimba & Lintin, 2023). Menurut Halim dalam (Samosir, 2019), Analisis Efisien merupakan kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dapat dianggap efisien jika sebuah rasio kurang dari satu atau di bawah seratus persen, yang menunjukkan bahwa sumber daya digunakan dengan optimal. Semakin rendah rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah daerah karena ini menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa harus melakukan pemborosan sumber daya atau menggunakannya terlalu banyak. Berdasarkan pendapat (Maidar & Rosalia, 2022), efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja, sesuai dengan rumus berikut ini:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\% \quad \dots(5)$$

Kemudian, hasil persentase dari perhitungan tersebut akan dikategorikan kedalam beberapa tingkatan penilaian efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

Persentase Perhitungan	Kriteria Efektifitas
> 100%	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Hasil penelitian tentang efisiensi anggaran belanja langsung dengan menilai realisasi anggaran belanja langsung terhadap realisasi anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023 dijelaskan di bawah ini:

$$2021 = \frac{17.814.518.170,15}{19.304.062.811,78} \times 100\% = 92,28\% \quad \dots(6)$$

$$2022 = \frac{19.646.308.157}{20.839.081.614} \times 100\% = 94,27\% \quad \dots(7)$$

$$2023 = \frac{21.279.878.990}{23.437.903.376} \times 100\% = 90,79\% \quad \dots(8)$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2021 hingga 2023 di atas, kriteria dapat ditentukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efisiensi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi %	Kriteria
2021	17.814.518.170,15	19.304.062.811,78	92,28%	Kurang Efisien
2022	19.646.308.157,00	20.839.081.614,00	94,27%	Kurang Efisien
2023	21.279.878.990,00	23.437.903.376,00	90,79%	Kurang Efisien

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi belanja langsung pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.

Pada tahun 2021, realisasi belanja langsung sebesar Rp. 17.814.518.170,15 sedangkan realisasi anggaran belanja adalah Rp. 19.304.062.811,78. Rasio efisiensi anggaran untuk tahun ini adalah 92,28%. Kriteria penilaian untuk rasio efisiensi ini adalah "kurang efisien". Artinya, terdapat ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, yang menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pada tahun 2022, realisasi belanja langsung mencapai Rp. 19.646.308.157 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 20.839.081.614. Rasio efisiensi anggaran pada tahun ini sedikit meningkat menjadi 94,27%, namun masih dalam kategori "kurang efisien". Peningkatan kecil ini menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki efisiensi, namun masih belum cukup untuk mencapai kategori yang lebih baik.

Pada tahun 2023, realisasi belanja langsung sebesar Rp. 21.279.878.990 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 23.437.903.376. Rasio efisiensi anggaran pada tahun ini turun menjadi 90,79%, tetap berada dalam kategori "kurang efisien". Penurunan ini menunjukkan bahwa ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan dari tahun 2021 hingga 2023, pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah sangat efektif. Tingkat efektivitas ini diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja yang sesuai dengan perencanaan dan jadwal untuk setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan yang memiliki anggaran belanja berjalan dengan baik. Namun, berdasarkan perhitungan dari tahun 2021 hingga 2023, pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum berjalan efisien. Tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Dengan mempertimbangkan signifikansi anggaran, sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta harus lebih memperhatikan ketelitian dalam penyusunan anggaran, terutama dalam pemeriksaan laporan keuangan. Lakukan analisis menyeluruh terhadap penggunaan anggaran untuk mengungkap area-area di mana pengeluaran mungkin belum efisien. Selain itu, lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja anggaran dan identifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Perhubungan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai hasil terbaik dalam mendukung penyelenggaraan layanan transportasi yang efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Bryan Malfin Nugraha Putra, Pupung Purnamasari, & Mey Maemunah. (2023). Pengaruh Tingkat Debt Covenant terhadap Audit Delay dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1978>
- Dharmawan, M. Y., Latif, I. N., & Dewi, C. K. (2021). Evaluasi Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaTenggarong Tahun 2016-2019). *Ekonomia*, 10(2), 207–215.
- Dinas Perhubungan. (2023). *Dinas Perhubungan D.I.Yogyakarta* (Issue 0321).
- Garini, N. T. (2021). *ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU*. Universitas Islam Riau.
- Hardiyanti, K., & Nurcholisah, K. (2023). Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Debt Maturity Terhadap Efisiensi Investasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1759>
- Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396>
- Junery, M. F., & Norhanisah. (2019). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 142–150.
- Maidar, & Rosalia, H. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kominukasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020. *Jurnal Serambi Akademica*, 10(6), 588–594.
- Manurung, K. M., & Mauliddina, F. (2021). Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Global Manajemen*, 10(2), 87. <https://doi.org/10.46930/global.v10i2.1813>
- Muhamad Lutfi Ramdhani, Nurleli, & Andhika Anandya. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan E-commerce terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i2.1331>
- Nurhikmah, F., Harahap, D. A., & Nurgraha, Y. D. (2023). Pengaruh Electronic Word of Mouth, Electronic Service Quality, dan Electronic Trust terhadap Purchase Decision pada Pengguna Shopee di Kota Bandung. *ICONOMICS: Journal of Economy and Business*, 1(1), 27–34.
- Panimba, W., & Lintin, M. T. (2023). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tana Toraja pada tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang telah dianggarkan , sehingga Rasio efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam menggambarkan pe.* 1(2).
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen* (3rd ed.). Widya Gama Press.
- Refika, O. (2022). PENERAPAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. In *Ekonomi SYariah*.
- Regina Calista Anjanie, & Dede Abdul Hasyir. (2023). Pengaruh Corporate Environmental Performance dan Environmental Cost terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 91–96. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.2429>
- Rondonuwu, T. V., Kewo, C. L., & Evinita, L. (2023). INSTANSI PEMERINTAH KOTA TOMOHON (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 118–130.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 6(1), 65–81.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Setiadi, A. D., & Mafruhah, A. Y. (2023). Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang. *ICONOMICS: Journal of Economy and Business*, 1(1), 9–16.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>